



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 19 November 2019
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Membahas Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018
Ketua Rapat	: Dra. Sri Rahayu /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 35 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), DR. Ir. Penny K. Lukito, MCP, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) dibuka pukul 14.22 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk menyerahkan ke Komisi IX DPR RI:
 - a. bahan evaluasi dan pelaksanaan APBN BPOM Tahun 2018 yang lengkap sampai per jenis belanja;
 - b. Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 per jenis belanja beserta laporan realisasi anggarannya sampai tanggal 20 November 2019;
 - c. Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 per jenis belanja; dan
 - d. Jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota, paling lambat tanggal 25 November 2019.
2. Berdasarkan proyeksi realisasi APBN Tahun 2019 sebesar 94%, Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran dan rencana realokasi anggaran yang tidak terserap untuk program dan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk mengutamakan upaya pencegahan dalam keseluruhan proses pengawasan obat dan makanan, sehingga ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang sesuai standar keamanan dan mutu untuk pencapaian derajat kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk mengambil langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan, termasuk mengintensifkan pendampingan dalam proses pemenuhan standar dan perizinan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk terus mengintensifkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, termasuk Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) melalui kemitraan bersama Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.03 WIB.

Jakarta, 19 November 2019

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

TTD.

Dra. SRI RAHAYU
A-217